

REKONSTRUKSI SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:

Tirta Winata¹⁾

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.^{*)}

Dr. Darwinsyah Minin, S.H., M.S.^{**)}

ABSTRAK

Korupsi sebagai *extra ordinary crime* memerlukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang bersifat *extra-ordinary* pula, sehingga wajar apabila pemerintah melakukan upaya-upaya ekstra dengan memperbaharui atau mengganti aturan hukum tentang korupsi

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mendekati masalah dan norma hukum yang berlaku. Norma hukum yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis.

Pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan suatu tujuan tertentu, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya ancaman pidana minimum khususnya haruslah lebih tinggi daripada ancaman pidana minimum khusus pada Pasal 2, agar tercipta rasa keadilan, yaitu : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pembuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya merumuskan ulang sanksi ancaman pidana dan minimum khusus dalam Pasal 3 agar tercapai aspek keadilan.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi, dan Keadilan

^{*)} Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

^{**)} Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan

RECONSTRUCTION OF CORRUPTION CRIMINAL SANCTIONS WHICH IS BASED ON JUSTICE VALUE

Tirta Winata^{*)}

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.^{*)}

Dr. Darwinsyah Minin, S.H., M.S.^{)}**

ABSTRACT

Corruption as an extraordinary crime requires the prevention and eradication of crimes that are extra-ordinary, so it is only natural for the government to make extra efforts by renewing or replacing the rule of law regarding corruption.

The type of research used for this study is to use normative legal research. Normative legal research is research that approaches the problems and legal norms that apply. Applicable legal norms in the form of written positive legal norms.

In general, criminal acts of corruption are carried out with a certain purpose, by misusing the authority, opportunity or means available to him because of the position or position as referred to in Article 3 of the Corruption Eradication Act, the threat of minimum criminality in particular must be higher than the minimum criminal threat specifically for Article 2, in order to create a sense of justice, namely: "Anyone who aims to benefit themselves or another person or a corporation, misuses their authority, opportunity or means because of their position or position that could harm the state's finances or the country's economy, sentenced to a life imprisonment or imprisonment of at least 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty) years and or a fine of at least Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp1,000,000,000. 00 (one billion rupiah).

Lawmakers for the Eradication of Corruption Crime should reformulate the sanctions of special criminal and minimum threats in Article 3 in order to achieve justice aspects.

Keywords: Criminal Sanctions, Corruption Crimes, and Justice

^{*)} Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University

^{**)} Promoters and co promoter Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University